

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

HARKEN DRAMA
NIM : 57690/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)

NAMA : Harken Drama
NIM/TM : 57690/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Disetujui oleh

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak
NIP: 197730213 199901 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, MSI, AK
NIP: 19781204 200801 2 001

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak
NIP: 197730213 199901 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

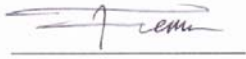
*Dinyatakan Lulus setelah diipertahankan di depan tim penguji skripsi
program studi akuntansi fakultas ekonomi
universitas negeri padang*

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)**

NAMA : Harken Drama
NIM/TM : 57690/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak	
2	Sekretaris	Erly Mulyani, SE, M.Si, AK	
3	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Si	
4	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harken Drama
NIM/Thn.Masuk : 57690/2010
Tempat/Tgl Lahir : Solok/20 Mei 1986
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. R.A Kartini No. 310 Kp. Jawa Kec Tj. Harapan Kota Solok
No. Hp/Telpon : 081266530532
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, April 2014

Yang menyatakan


Harken Drama
NIM:57690/2010

ABSTRACT

Harken Drama (2010/57690). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok). Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing II : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

This study aims to examine the influence of the quality of financial reporting information, internal control system, on the quality of financial reporting information. This study is classified as a type of research that is causative.

The population in this study is the Regional Working Units (on education). The sample in this study is the staff / employees of the importance of the financial part of the respondents were 68 respondents. The data was collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. Technical analysis of the data used is multiple regression with SPSS 16.

Conclusion The study shows: the influence of the implementation of regional financial accounting system on the internal control system of thitung > ttabel yaitu $3,766 > 1,977$. This shows that this study can prove that the implementation of regional financial accounting system (X1) has a significant influence on the Information Quality of Financial Statements, that the first hypothesis is accepted. The implementation of regional financial accounting system on the quality of financial statement information of $t > t$ table is $2,444 > 1,997$. This shows that this study can prove the the quality of financial reporting information has a significant influence on the Information Quality of Financial Statements (Y), that the second hypothesis is accepted. internal control system of $t > t$ table is $1,709 < 1,997$. This shows that this study can not prove that internal control system (X2) has a significant influence on the Information Quality of Financial Statements, that the first hypothesis is rejected.

Keywords: the implementation of regional financial accounting system on the quality of financial reporting information with internal control system as an intervening variable

ABSTRAK

Harken Drama: 2010-57690. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok). Skripsi: FE-Akuntansi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern kualitas informasi laporan keuangan. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Solok. Sampel dalam penelitian ini adalah staf/ karyawan bagian keuangan maka didapat responden sebanyak 68 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *SPSS 16*.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,766 > 1,977$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern (X_2), sehingga hipotesis pertama diterima. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,444 > 1,997$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y), sehingga hipotesis kedua diterima. sistem pengendalian intern (X_2) terhadap kualitas informasi laporan keuangan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,709 < 1,997$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa sistem pengendalian intern (X_2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Kata kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, allahumma sholi'alamuhammad waala alimuhammad.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada BAPAK Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Yunia Wardi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Prodi dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Akuntansi

3. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Si dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Orang tua tercinta, Papa Edisar, Mama Nurhayati Muis dan tante Desmawati Muis yang memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Kakak Refika Sari, A.Md dan Adik-adik Jefrinaldo Serta Meliza Drama terima kasih buat do'a dan supportsnya.
7. Teman-teman kelas transfer 2010 yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Agustus 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Kualitas Laporan Keuangan.....	10
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	19
3. Sistem Pengendalian intern.....	27
4. Penelitian Terdahulu.....	31
5. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis..	32
B. Kerangka Konseptual.....	35

C. Hipotesis Penelitian.....	35
------------------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian.....	40
F. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	42
G. Uji Asumsi Klasik.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	46
I. Definisi Operasional.....	54

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
B. Demografi Responden.....	56
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	60
D. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	65
E. Uji Asumsi Klasik.....	67
F. Teknik Analisis Data.....	80
G. Pembahasan.....	82

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	89
B. Keterbatasan.....	90
C. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	35
2. Diagram Jalur Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporn Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening	49
3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Sistem Pengendalian Intern.....	50
4. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporanann Keuangan	75
5. Pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD di Kota Solok	38
2. Daftar Skor Jawaban Pertanyaan	41
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	41
4. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	56
5. Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
6. Karakteristik Reponden Berdasarkan Usia	58
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	58
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	59
9. Tingkat Capaian Responden Kualitas Laporan Keuangan Daerah	60
10. Tingkat Capaian Responden Penerapan SAKD.....	62
11. Tingkat Capaian Responden Sistem Pengendalian Intern	63
12. Nilai <i>Cornbach alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	65
13. Hasil Uji Reliabilitas.....	66
14. Uji Normalitas.....	67
15. Uji Multikolonearisitas.....	69
16. Uji Heteroskedastisitas.....	70
17. Uji F Statistik.....	
18. Koefisien Determinasi	
19. Uji t Hitung	62
20. Uji F Statistik	75
21. Uji Koefisien Determinasi	76
22. Uji t Hitung	77
23. Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Penyempurnaan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 telah mengubah akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). UU dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan (Darise 2008).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparansi, partisipatif dan bertanggung jawab. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance (Darise 2008).

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menggunakan sumber keuangan yang dimiliki, akan tetapi pemerintah dituntut untuk memberikan informasi secara transparan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan kepada masyarakat. Adanya otonomi daerah menimbulkan tuntutan reformasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang telah direspon oleh Pemerintah dengan menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.

24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Informasi yang berkualitas ialah informasi akuntansi yang memenuhi beberapa karakteristik sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan transparan dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Menurut Indra (2010) karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Kualitas informasi yang disediakan dalam laporan keuangan pemerintah merupakan informasi yang mudah untuk dipahami. Laporan keuangan merupakan media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Agar informasi tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi penggunaannya maka informasi tersebut harus bisa memenuhi kualitas tertentu. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). Dalam penyusunan laporan keuangan maka

diperlukan orang-orang yang bisa membuat dan mengerti tentang laporan keuangan. Baik individu maupun kelompok yang terlibat langsung terhadap hasil informasi keuangan yang diperoleh dari suatu sistem yang dibuat.

Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang diberikan akan kehilangan relevansinya (Hanafi dan Halim, 2005).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada calon investor, dan calon kreditor, pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Selain itu laporan keuangan juga bermanfaat bagi manajemen untuk pelaksanaan kegiatan operasi laporan manajemen sehari-hari. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memberi dasar bagi manajemen untuk menetapkan rencana kegiatan perusahaan untuk periode yang akan datang. Dengan demikian informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat penting bagi investor dan manajemen sehingga harus dapat dilaksanakan (Mohamad, 2004).

Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan dokumen dihasilkan (Bastian,2010). Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemda pun memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem tersebut dinamakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya (Bastian, 2007).

Penyusunan laporan keuangan daerah yang berpedoman pada SAKD ini sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud juga mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Jeleknya pengelolaan keuangan daerah salah satunya disebabkan oleh penerapan SAKD yang dianggap masih lemah dan belum seragam pada setiap daerah sehingga meningkatnya peluang terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Hilda, 2010). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ketika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Salah satu cara melihat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah sesuai dengan kualitas informasi yang diharapkan, maka dapat dilihat dari opini auditor. Fenomena yang terjadi di Pemda Kota Solok berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2012 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ini berarti tidak ada peningkatan opini dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tetapi pada tahun 2013 pemda kota solok mendapatkan opini WTP.

Pengendalian intern menurut COSO 1992 dan SAS 78 dalam Hiro Tugiman (2005), adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan (*Arrens dan Loebacke*, 2000) dalam hal : keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi

Kuye dan Sulaimon (2011) menemukan produktifitas atau kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajer *involment* (keterlibatan manajer), sementara menurut *Lau dan Anthony* (2008) terdapat hubungan langsung atau tidak langsung. Sistem pengendalian intern yang berkualitas juga akan mengakibatkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Hiro Tugiman (2000) dan Prasetyo Kompyurini (2007), mengenai pengaruh peran auditor intern serta faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja perusahaan serta disimpulkan bahwa manajemen puncak pengaruhnya sangat besar terhadap pelaksanaan pengendalian intern.

Hasil penelitian Widyaningsih dan Triantoro (2011) yang meneliti tentang hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan, kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. Menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih baik. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan sangat efektif dan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Safrida, Nadirsyah, dan Usman (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh.

Perbedaan yang penulis lakukan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin meneliti pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada hubungan

efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern. Karena informasi laporan keuangan harus handal dan terpercaya karena akan memengaruhi keputusan yang akan diambil bagi para pengguna laporan keuangan dan akan berdampak bagi kegiatan usaha yang akan dijalankan. Dalam penelitian ini penulis juga memilih sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pemerintah daerah kota Solok provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada penelitian sebelumnya sampel yang dipilih pemerintah daerah Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas informasi laporan keuangan yang di hasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok. Alasan Peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Solok adalah karena Kota Solok merupakan salah satu daerah yang mendapatkan opini WDP enam kali dalam beberapa tahun belakang, yaitu pada tahun 2007 sampai tahun 2012 tetapi, pada tahun 2013 kota Solok mendapatkan WTP yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan ?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variable intervening ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
3. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap sistem pengendalian intern.

D Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mempelajari dan memahami secara baik mengenai pengaruh efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern dengan variabel intervening. Serta dapat memberikan informasi mengenai hal – hali berkaitan dengan penelitian ini.

b) Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dengan menerapkan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pada pemerintahan provinsi Sumatera Barat.

c) Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan skripsi ini dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2010) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 dalam Ratih (2010) tujuan laporan keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2004) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi / unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa dimasa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan entitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan entitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No. 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat / daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit LRA, pembiayaan, sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, diantaranya: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

3. Neraca

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: pendapatan laporan operasional kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus / defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus / defisit laporan operasional.

5. Laporan Arus Kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus

kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan pada periode sebelumnya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya: ekuitas awal, surplus / defisit laporan operasional pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 laporan di atas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai dan lainnya.

d. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Kualitas informasi laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Suwardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keterpautan atau relevansi dan keterandalan atau reliabilitas, dan ketepatan penyimbolan. Unsur keterpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifiabilitas. Kualitas sekunder adalah keterbandingan, konsistensi, dan kenetralan.

Dalam PP No. 24 tahun 2005, kualitas informasi laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas informasi yang dikehendaki menurut PP No. 71 tahun 2010:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari penegrtian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari paparan di atas dapat kita menilai bagaimana seharusnya laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik, apakah telah memenuhi karakteristik kualitatif atau belum. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Perkembangan akuntansi keuangan daerah – akuntansi sektor publik pada penerbitan manual keuangan daerah 2001 telah menuju ke arah positif. Komite standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah telah menyetujui orientasi ke International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dengan strategi masa transisi. Persetujuan ini merupakan tanda pengakuan bahwa pelaporan keuangan berbasis IPSAS ini dapat diterima. Dan sistem akuntansi keuangan daerah – akuntansi sektor publik ini juga berpedoman pada standar akuntansi daerah (Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2005) atau prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

Sedangkan menurut Nordiawan (2008) mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut : “suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan

dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SAKD merupakan suatu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah.

b. Tujuan SAKD

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu:

1. Pertanggung jawaban

Akuntansi pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab pada operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggung jawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan manajerial ini perlu

dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

c. Ruang Lingkup SAKD

Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal. Pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemda baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai stakeholders yang meliputi:

1. DPRD

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemda untuk mengelola keuangan daerah.

2. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh

pemda, yang mana yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Investor, kreditor, dan donator

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

4. Analisis ekonomi dan pemerhati pemda

Adalah pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemda seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, dan LSM.

5. Rakyat

Rakyat disini merupakan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menreima pelayanan pemda atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

6. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemda untuk menilai pertanggung jawaban gubernur sebagai wakil pemerintah dari daerah (pasal 2 PP No. 108/2000).

7. Pemda lain (provinsi, kabupaten/kota)

Pemda saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam melakukan pinjaman (penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf e PP No. 107/2000 tentang pinjaman daerah).

d. Karakteristik SAKD

SAKD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik (Nordiawan, 2008 : 287), diantaranya:

1. Basis Akuntansi

Dalam hal ini, sistem akuntansi pemerintah menggunakan dua basis akuntansi yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

2. Sistem pembukuan

Sistem pembukuan pada pemerintah menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007 mengenai akuntansi keuangan daerah dimana sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi prosedur pengelolaan kas, prosedur pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

e. Penerapan SAKD

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP ini menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. PP ini selanjutnya terus diperbaharui dengan di keluarkannya PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Permendagri No. 13 tahun 2006 ini merupakan penyempurnaan dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasian yang mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*). Disamping itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan

catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, meliputi:

- a. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- b. Penggolongan dan Pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.
- c. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Selanjutnya menurut Halim (2002), implementasi sistem akuntansi di daerah dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Untuk kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri

Penerapan sistem informasi keuangan daerah harus lebih ditekankan pada pencapaian visi dan misi dari daerah itu sendiri. Untuk menyediakan segala kebutuhan informasi keuangan di daerah yang baik perlu didukung oleh seperangkat komputer dengan segala pendukungnya.

2. Untuk kebutuhan pemerintah yang lebih tinggi

Disamping untuk kebutuhan daerah, masing-masing sistem informasi diharapkan juga dapat memberikan data mengenai daerahnya kepada pemerintah pusat dengan cepat, akurat, dan up to date sehingga tugas pemerintah pusat sebagai pengendali akan lebih mudah menjalankannya.

3. Untuk kepentingan masyarakat umum sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintah di daerah.

3. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Adapun tujuan sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan pemerintah dikatakan efektif bila ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif untuk menjaga tercapainya tujuan. Sedangkan efisien dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai standar (BPKP, 2009).

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal/layak dipercaya, dalam arti menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian, seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 (dalam BPKP), adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern

dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, yang mencakup:

- a. Penegakkan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan kegiatan analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Pemisahan fungsi
- f. Pencapaian yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- g. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa

rekomendasi hasil audit dan rewiuw lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan rewiuw lainnya.

4. Penelitian terdahulu

Hasil penelitian Widyaningsih dan Triantoro (2011) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih baik. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalaian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan sangat efektif dan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Safrida, Nadirsyah, dan Usman (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem

akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh.

5. Hubungan Antar Variabel Dan Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Sistem Pengendalian Intern

Penelitian terdahulu Widyaningsih dan Triantoro (2011) menyebutkan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan penerapan sistem akuntansi yang berjalan secara efektif. Tingkat efektifitas penerapan sistem akuntansi dapat menentukan berjalan tidaknya sistem pengendalian intern dengan baik. Sistem pengendalian intern yang baik akan menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sehingga akan mengakibatkan akuntansi keuangan daerah menjadi efektif. Tingkat penerapan sistem akuntansi dapat menentukan berjalan tidaknya sistem pengendalian intern dengan baik

Pengendalian intern merupakan upaya yang dilakukan mencakup unsur-unsur pengendalian intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dipercayanya informasi dan data, serta ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku. Agar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik, maka SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) harus disusun dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan

pengendalian intern secara baik dan efektif pada suatu pemerintahan, maka akan meningkatkan kualitas informasi keuangan.

2. Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Mulyadi (2001) mengkaitkan tujuan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004).

Hal ini sejalan dengan pendapat Darise (2008) yang menyatakan bahwa keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai. Penelitian yang dilakukan Hilda (2010), menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Apabila penerapan SAKD pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya, apabila penerapan SAKD tidak sesuai dengan aturannya maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak bagus.

3. Hubungan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

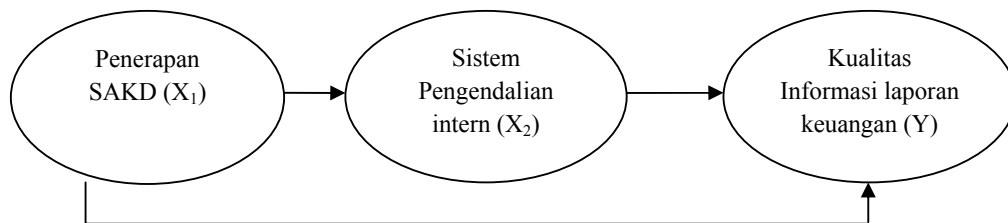
Sistem Pengendalian Intern yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai. Apabila SPI dapat diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik, dan begitu pula sebaliknya, apabila penerapan SPI tidak berjalan dengan baik, maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik pula.

Penelitian Mahmudi dalam Hamdani (2011) menyatakan bahwa, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan atau mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Penelitian ini mencoba mencari kejelasan tentang pengaruh efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kota Solok.

Untuk lebih jelas kaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan skema konseptual sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

H₂ : Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

H₃ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Sistem pengendalian intern.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening pada SKPD Kota Solok. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Penerapan SAKD berpengaruh signifikan positif terhadap sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukkan fungsi dari suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang lebih baik maka akan menunjang akuntabilitas keuangan daerahnya lebih ba
2. Penerapan SAKD dalam pengujian hipotesis berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Solok. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. dengan demikian, jika sistem pengendalian intern pada SKPD Pemda Kota Solok baik dalam artian unsur-unsur dari SPI (lingkungan penendalian,

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern), dijalankan dengan maksimal, maka akan tercipta kualitas informasi keuangan yang baik pula.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Data penelitian ini diperoleh dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrumen kuesioner. Hal ini sangat mempengaruhi validitas hasil karena jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Persepsi responden akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.
2. Masih adanya sejumlah variabel lain yang tidak digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi kualitas informasi keuangan.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis data dan pembahasan, penerapan SAKD mendukung kualitas informasi laporan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan agar lebih baik lagi instansi perlu meningkatkan penerapan SAKD untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memotivasi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertibangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan kualitas informasi laporan keuangan menjadi kuat.
4. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bastian, Indra 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Erlangga
- Delano, Galuh Fajar. 2011. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan sistem Penendalian Intern Sebagai Variabel intervening*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNP.
- Desi Indriasari & Ertambang Naerhartyo. 2007. *Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Symposium Nasional Akuntansi XI.
- Emillyza, Rinda. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang. (Tidak dipublikasikan)
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hamdani, Sugita. 2011. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Study Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Padang)*. Skripsi Program S, Unikom.
- Harifan, Handriko. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang. (Tidak dipublikasikan)
- Hilda, Erfina. 2010. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang)*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang. (Tidak dipublikasikan)

- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Indriasari, Desi. 2007. *Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Symposium Nasional Akuntansi XI
- Jamyla. 2010. *Hubungan Faktor Sikap Dalam Implementasi SAPD dengan Kualitas Informasi Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan*. Seminar Akuntansi Nasional.
- Latifah, Lyla. 2007. *Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Study Empiris pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta*. Seminal Nasional Akuntansi X. Makasar
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nordiwan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang *Pedoman dalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- , Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)*

- Sugiono. 2008. *Metode penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- Wahyuni, Asnita. 2011. *Pengaruh Penggunaan TI, Keahlian Pemakai dan Keterlibatan Pemakai terhadap Efektifitas Penerapan SIA*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNP
- Warsoko, Soesanto. 2007. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi pada Implementasi Basis Data PFAMS*. Padang: Jurnal FE UNAND. Volume 11. No. 4
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Winidyaningrum, Celviana. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknomogi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII
- www.bpk.go.id. *Opini Wajar Dengan Pengecualian Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kabupaten Lima Puluh Kota*. Akses tanggal 01 Juni 2013
- Yuliani, Safrida. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*.